

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa Pandemi COVID-19 yang terjadi dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun lalu merupakan pukulan keras bagi basis perekonomian internasional terutama kehidupan masyarakat di dalamnya. Melemahnya aktivitas akibat berbagai macam pembatasan fisik di berbagai negara pada akhirnya memberi dampak domino yang melunturkan transaksi hingga negosiasi antar negara yang masing-masing membatasi diri. Interaksi antar negara tidak kuat sehingga sektor-sektor lain yang menyangga perekonomian bisnis mulai terganggu akibat pemberlakuan pembatasan fisik yang saat itu sempat terjadi transisi mulai dari istilah *lockdown*, PSBB skala besar, PSBB skala kecil, PPKM Mikro, PPKM Makro, dan lain sebagainya berdasarkan keputusan pemerintah masing-masing dalam suatu negara.

Kondisi kesejahteraan dan perekonomian sebagian besar masyarakat Indonesia saat masa krisis akibat pandemi COVID-19 di awal tahun 2020 adalah peristiwa di luar prediksi normal karena dapat dikategorikan sebagai bencana non-alam sebagaimana tertuang dalam UU No.24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa wabah penyakit termasuk kategori bencana non-alam. Pandemi COVID-19 terbilang menjadi faktor fundamental yang melemahkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat terutama bagi para pekerja fisik maupun pekerja dengan mobilitas tinggi di luar rumah. Kesenjangan antara masyarakat kelas sosial tinggi dan rendah begitu terasa akibat diperparah oleh masa Pandemi COVID-19, yang kemudian grafiknya mulai melandai setelah memasuki masa *New Normal* hingga geliat vaksinasi dari pemerintah supaya mempercepat pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Pada prinsipnya pertumbuhan ekonomi adalah suatu indikator yang sangat penting dalam menilai sebuah kinerja perekonomian suatu negara, terutama digunakan untuk menganalisis hasil dari pembangunan ekonomi pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menjadi suatu indikator kesejahteraan masyarakat sehingga menjadikan pekerjaan pemerintah untuk meningkatkan hal tersebut dengan berbagai cara seperti makro dan mikro. Kebijakan pemerintah perlu diimplementasikan sebagaimana situasi dan kondisi lapangan hingga terbentuk penyesuaian dalam rangka mengatasi kesenjangan sosial, krisis berkepanjangan, maupun krisis pendapatan (Fikriawan, 2019).

Implementasi kebijakan pemerintah di berbagai daerah terus digalakkan guna mengantisipasi kebutuhan dasar masyarakat yang terkena imbas dari wabah pandemi COVID-19 sehingga pendapatan berkurang. Beberapa imbas lain yang terjadi selama masa pandemi COVID-19 adalah sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaan karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), lalu kategori masyarakat yang menggantungkan hidupnya melalui perdagangan tradisional dimana pembatasan jam operasional sangat berpengaruh terhadap hasil usaha. Di tengah krisis multi-dimensi, status masyarakat dalam kategori ekonomi lemah (miskin) juga turut menjadi beban tambahan bagi pemerintah untuk mampu mengupayakan tingkat kesejahteraan dengan margin sekecil mungkin.

Maka dari itu salah satu implementasi kebijakan konkrit pemerintah sebagaimana dikutip dari Tribunnews (2021) adalah mengantisipasi krisis melalui gelontoran Bantuan Sosial (Bansos) dengan berbagai jenis seperti: BST (Bantuan Sosial Tunai), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), subsidi listrik, subsidi internet, sembako, BST-Usulan Daerah, Program Kartu Prakerja, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Penyaluran Bansos menjadi alternatif pemerintah untuk meng-cover kebutuhan dasar masyarakat di berbagai daerah agar tetap mampu bertahan hidup di tengah krisis mendadak. Penyaluran Bansos pada akhirnya digencarkan melalui keterlibatan banyak pihak terutama pemerintah desa dan lembaga-lembaga lain dari unsur pemerintah serta swasta yang ikut turun tangan mengatasi krisis akibat wabah pandemi COVID-19.

Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu daerah yang terkena imbas langsung dari pandemi COVID-19, bahkan keadaan COVID-19 di Ponorogo dengan jumlah penambahan kasus positif hingga isolasi di tahun 2020 terbilang sangat tinggi se-Provinsi Jawa Timur. Penyaluran Bansos menjadi begitu krusial bagi Pemkab Ponorogo melalui optimalisasi Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD). Penyaluran Bansos di wilayah Ponorogo diawasi secara langsung oleh Pemprov Jawa Timur dalam rangka mencapai efektivitas penyaluran, pemenuhan target, serta manfaat jangka panjang kepada warga masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jadwal dan teknis pencairan Bansos dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa agar penyerapan kebijakan lebih maksimal karena dikontrol oleh banyaknya unit-unit kecil. Selain itu penyaluran Bansos juga beriringan dengan program percepatan pemulihan kesehatan hingga ekonomi pemerintah melalui vaksinasi COVID-19, karena tidak jarang ditemui warga yang masih sulit untuk disuntik vaksin (Jatimprov, 2022).

Jika dicermati lebih lanjut, COVID-19 memang melemahkan aktivitas dan pendapatan masyarakat terutama masyarakat yang berada dalam kategori miskin. Maraknya Bansos yang merupakan implementasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah sebenarnya sah-sah saja sebagai suatu regulasi alternatif. Akan tetapi ketika dibenturkan dengan analisis jangka panjang untuk kebutuhan masyarakat bawah, maka Bansos bukan satu-satunya formulasi kebijakan yang terus-menerus dapat diandalkan secara jangka panjang. Terlebih lagi fakta di lapangan menyebutkan bahwa Bansos kadang kala masih memunculkan polemik dan kecemburuan sosial akibat penyaluran kurang tepat serta perspektif masyarakat yang memiliki standarisasi penilaian terhadap orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu Bansos memiliki dua potensi sekaligus dalam mempengaruhi keberdayaan hidup masyarakat di masa krisis akibat COVID-19.

Berdasarkan latarbelakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Akibat Masa Pandemi COVID-19”** (*Studi Penelitian Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo*). Kajian yang dimaksud peneliti adalah difokuskan kepada teknis, pertimbangan, penyesuaian, serta pemenuhan target penyaluran Bansos oleh instansi berwenang yakni Dinas Sosial P3A Ponorogo. Melalui kewenangan untuk menata dan menjalankan kebijakan penyaluran Bansos, maka kajian penelitian akan dilakukan secara mendalam pada sisi internal Dinas Sosial yang tentunya dihubungkan dengan realita kehidupan masyarakat Ponorogo di lapangan selama masa pandemi COVID-19 termasuk suatu faktor dukungan maupun faktor penghambat yang ditemukan di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Didasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, penulis mengambil sebuah rumusan masalah seperti dibawah ini:

Bagaimana kewenangan yang diterapkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo dalam implementasi kebijakan penyaluran Bansos selama masa pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Guna mencari tau bagaimana kewenangan yang diterapkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo dalam implementasi kebijakan penyaluran Bansos selama masa pandemi COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharap bisa bermanfaat seperti dibawah ini:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharap bisa mempunyai manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama pengembangan masyarakat luas dan juga khususnya untuk perpustakaan untuk menjadi acuan sumber belajar dan informasi yang berguna untuk pemustaka dan pemanfaatan serta pengembangan media yang berbentuk informasi dalam perpustakaan untuk memberi kontribusi pada kemajuan kualitas pembelajaran khususnya pada penyelesaian karya tulis ilmiah maupun tugas akhir.

2. Secara praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bisa menambahkan pengetahuan serta wawasan dan merupakan salah satu syarat dalam mendapatkangelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo serta untuk meningkatkan kemampuan dalam menulis penelitian.

b. Bagi Pemerintah dan OPD Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini bisa dipakai untuk bahan pertimbangan pada penyusunan program penyaluran bantuan sosial oleh Pemkab Ponorogo beserta jajaran OPD lain khususnya di daerah-daerah potensial.

c. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini bisa menambah koleksi pustaka guna dijadikan bahan bacaan serta kajian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo, terutama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan bayangan yang makin jelas mengenai permasalahan yang sedang diteliti, dibutuhkan penegasan istilah yang ada pada judul, yakni:

1. Kebijakan

Pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan berarti serangkaian konsep yang mendasari semua rencana dalam melakukan kepemimpinan, pekerjaan, ataupun cara bertindak (mengenai organisasi, pemerintahan, atau yang lainnya), tujuan, cita-cita, prinsip, serta pedoman agar terdapatnya target sasaran. Menurut Carl J Federick seperti yang dikutip (Leo, 2008) menjelaskan kebijakan merupakan rangkaian aktivitas yang seorang individu, kelompok, ataupun pemerintah usulkan pada sebuah lingkup tertentu yang mana terdapat hambatan serta kesempatan pada pelaksanaannya guna tercapainya tujuan tertentu.

2. Definisi Pemerintah

Menurut R. Mac Iver dalam (Kencana, 2003), Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari semua orang yang memiliki kekuasaan. Pemerintah juga dapat diartikan sebagai perusahaan besar yang melingkupi perusahaan yang masyarakatnya miliki.

3. Definisi Bantuan Sosial (Bansos)

Pemberian bantuan kepada individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat dalam kelas sosial tertentu yang dipelopori oleh lembaga pemerintah mulai dari tingkat desa, tingkat daerah, hingga tingkat pusat. Bantuan sosial memiliki kecenderungan untuk mengikuti situasi dan kondisi lapangan yang bersifat dinamis, artinya dapat berubah sewaktu-waktu baik dari segi kebijakan, sasaran, besaran, target waktu, situasi darurat, dan faktor-faktor lain yang sejenis. Bantuan sosial tidak harus dalam wujud uang tunai untuk diberikan kepada penerima manfaat, akan tetapi dalam berupa wujud fisik lain seperti sembako, subsidi listrik, subsidi bahan bakar, dan lain sebagainya. Ada pun sifat lain dari bantuan sosial pada dasarnya adalah disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah

baik yang bersumber dari APBDes, APBD, maupun APBN (Dadu & Sodik, 2021).

4. Definisi Pandemi

Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi secara tiba-tiba dan terdapat dimanapun, mencakup semua negara. Pandemi adalah epidemi yang penyebarannya bisa sampai di semua negara hingga benua serta umumnya hampir menyerang orang banyak. Pandemi juga bisa terjadi dalam area geografis tertentu serta terjadi secara tiba-tiba (Agus Purwanto, 2020).

5. Definisi COVID-19

COVID-19 adalah suatu penyakit menular yang penyebabnya ialah virus corona terbaru, biasanya dinamai sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (SARS-CoV-2) (Sayekti, 2020).

F. Landasan Teori

1. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu aturan, prosedur digunakan untuk menentukan perilaku seseorang, misalnya, otoritas, kelompok, atau organisasi tertentu untuk memecahkan masalah. Pada dasarnya ada banyak definisi atau pemahaman bersyarat tentang proses. Menurut Noeng Muhajir, kebijakan adalah upaya untuk memecahkan masalah-masalah sosial seperti keadilan dan kesejahteraan untuk kepentingan masyarakat. Dan sistem tersebut harus memenuhi setidaknya empat elemen kunci: meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kesetaraan, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi (dalam pemecahan masalah, perencanaan, pengambilan keputusan dan implementasi) dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kebijakan adalah pedoman dan batasan keseluruhan yang merupakan kebijakan tindakan dan aturan yang harus ditaati semua pihak serta pelaksana dikarenakan sangatlah penting untuk organisasi pengolah dan memutuskan rencana yang disepakati. Dengan demikian, politik akan menjadi alat untuk memecahkan masalah atas tindakan yang terjadi. Pada saat yang sama, jika politik menjernihkan hati atau mengilhami harapan, menurut Wehrich dan Koontz, dikutip dalam Amin Priatna, inisiatif itu dalam batas. Kebebasan bergantung politikm serta sebaliknya bisa mencerminkan status serta kekuasaan organisasi. Etika adalah pemahaman ataupun pernyataan yang memandu pikiran ketika mengambil keputusan. Tak semua kebijakan adalah

pernyataan, namun biasanya tersirat dalam perilaku manajemen. Meskipun Koontz, Donnell, serta Wehrich berpendapat, politik merupakan panduan untuk berpikir dan membuat keputusan ini (William, 1998).

Pembuatan kebijakan merupakan semua tahap pada siklus hidup kebijakan. Siklus hidup atau tahapan dari sebuah kebijakan intinya merupakan dimulai dari merumuskan permasalahan, mengidentifikasi alternatif, mengimplementasi kebijakan serta kembali pada perumusan masalah. Budi Winarno (dalam Miftah Thoha 2002:15-17), yang membuat kutipan berdasarkan beberapa ahli, seperti:

- a) Carl Friedrich (1963), Kebijakan merupakan arah perilaku yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu
- b) Richard Rose (1969), Kebijakan merupakan rangkaian aktifitas yang memiliki hubungan dan juga konsekuensi untuk semua yang memiliki sangkut pautnya, tidak berupa keputusan yang berdiri sendiri.
- c) Robert Eyestone (1971), Kebijakan publik merupakan ikatan dari badan pemerintah dengan lingkungannya.
- d) Thomas R. Dye (1975), Kebijakan merupakan semua hal yang pemerintah pilih untuk dilakukan ataupun tidak.
- e) James E. Anderson (1979), Kebijakan merupakan arah perilaku yang memiliki tujuan tertentu, yang seseorang ataupun beberapa orang tetapkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.
- f) Amir Santoso (1993) mengelompokkan pernyataan para ahli dalam dua kelompok: yang pertama, bahwa segala tindakan pemerintah merupakan kebijakan publik. Kedua, bahwa kebijakan publik merupakan putusan pemerintah yang memiliki maksud serta tujuan tertentu serta mempunyai akibat yang bisa diramalkan. Di Indonesia memiliki tuntutan pembangunan yakni menuntut kita agar tidak cuma diam namun harus selalu menambah kemahiran agar bisa mewujudkan pembangunan. Berkaitan dengan hal ini, dalam memecahkan pendapat bisa mengantisipasi berbagai perubahan yang yang cepat menggunakan suatu langkah melakukan sebuah kebijakan ataupun tindakan.

2. Bantuan Sosial

Untuk merumuskan teori tentang Bantuan Sosial, perlu memahami terlebih dahulu bahwa Bantuan Sosial berhubungan langsung dengan Kebijakan sosial oleh otoritas lembaga pemerintah. Tujuan dari bantuan sosial adalah menyukseskan keberlangsungan hidup masyarakat melalui prinsip prioritas dan pemerataan, sehingga penyaluran suatu bantuan sosial perlu untuk melalui tahap pertimbangan selektif. Respon pemerintah terhadap permasalahan publik (masyarakat) merupakan tindakan yang harus diwujudkan melalui kebijakan sosial atau bantuan sosial dengan catatan kondisi lapangan benar-benar menunjukkan situasi darurat sehingga perlu untuk segera diambil alih/diantisipasi demi pemenuhan hak-hak dasar masyarakat (Bessant *et al*, 2006: 4).

Suharto (2005) merumuskan bahwa Bantuan Sosial merujuk pada keputusan dasar pemerintah sebagai upaya menanggulangi permasalahan pokok terutama pangan, maka sejatinya masyarakat memang membutuhkan pelayanan maupun program-program yang menunjang keberdayaan hidup maupun tunjangan sosial lainnya. Bantuan Sosial yang baik memiliki beragam fungsi ideal yang mampu menguatkan keberadaan pemerintah sekaligus masyarakat di dalamnya, ada pun beberapa fungsi ideal tersebut adalah:

- a) Fungsi preventif (pencegahan),
- b) Kuratif (penyembuhan), dan
- c) Pengempangan (developmental).

Bantuan sosial dapat diartikan pula sebagai suatu ketetapan berdasar atas dasar kewenangan dan kepekaan pemerintah dalam menjamah permasalahan atau krisis yang terjadi di dalam masyarakat akibat berbagai faktor pemicu seperti bencana alam, perang, kriminal, kelalaian manusia, rendahnya pendidikan, sempitnya lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Desain dari program bantuan sosial secara umum memerlukan penyesuaian dengan bijak dan proses penentuan bantuan sosial perlu untuk didukung oleh banyak pihak (kolektif) supaya terbentuk variabel kehati-hatian.

Teori di atas didukung oleh teori lain milik Ahmad (2022) semakin memperkuat bahwa keberadaan bantuan sosial adalah parameter bagi kinerja pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penataan kesejahteraan sosial masyarakat terutama masyarakat miskin. Krisis di dalam suatu negara perlu ditopang dengan kreativitas dan ide mumpuni, akan tetapi bantuan sosial tunai

dan non tunai lebih dapat diterima oleh masyarakat karena prosesnya tidak bertele-tele. Upaya pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penyaluran bantuan sosial di masa sekarang ini sudah sangat familiar atau dikenal sebagai kebijakan umum yang banyak diaplikasikan di berbagai tempat. Keadaan sosial masyarakat bisa jadi hanya sekedar bertahan, akan tetapi perubahan sosial memerlukan kebijakan dan usaha berlebih jika ingin mengentaskan krisis dan kemiskinan. Hambatan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup tidak serta merta dapat bergantung pada program pemerintah.

Didasarkan dari teori-teori di atas bisa diambil kesimpulan bahwa bantuan sosial terkadang bersifat abstrak (kasat mata) sehingga masyarakat perlu untuk memahami secara mendalam karena sifat dari bantuan maupun kebijakan sosial tidak dapat disamakan dengan kebijakan publik lainnya. Program-program sosial kemasyarakatan tidak berupa hasil yang instan layaknya pembangunan gedung, jembatan, sarana umum, dan lain sebagainya. Akan tetapi bantuan sosial lebih bersifat mendewasakan pemikiran, perilaku, serta mawas diri dari masyarakat untuk melakukan perbaikan kualitas seiring dengan dukungan sosial pemerintah yang tentu bersifat dinamis. Dalam arti lain suatu bantuan sosial memang tidak dapat dikesampingkan keberadaannya selama berfungsi untuk mengatasi keadaan darurat, akan tetapi peranan dari masyarakat sendiri justru lebih besar maknanya daripada sekedar mengandalkan bantuan sosial. Masyarakat sebagai makhluk sosial pada hakikatnya memiliki potensi untuk mengembangkan diri masing-masing untuk memperbaiki kualitas sosial, maka dari itu bantuan sosial sebenarnya hanya sekedar menjadi *triggered* untuk memaksimalkan kehidupan jangka panjang melalui usaha pemerintah dan masyarakat.

3. **Pandemi COVID-19**

Sekarang ini, semua negara masih mengalami pandemi yang berdampak cukup besar pada semua sektor hidup manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah menetapkan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 menjadi suatu ancaman pandemi. Arti kata pandemi berdasarkan KBBI adalah wabah yang menyerang secara bersamaan di mana pun serta meliputi geografi yang luas. Virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan sehingga berakibat adanya gangguan dalam sistem pernafasan, pneumonia akut, hingga kematian. Virus ini merupakan keluarga virus berakibat adanya penyakit

dari gejala yang ringan sampai berat. Ada dua jenis virus corona yang dapat menyebabkan penyakit dengan gejala yang berat. Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru (Zaenal, 2020).

Awal mula munculnya penyakit ini karena adanya kasus pneumonia yang etimologinya tidak diketahui di Wuhan, China di akhir Desember 2019. Didasarkan dari hasil penyelidikan epidemiologi, kasus ini memiliki hubungan dengan Pasar Sea food di Wuhan. Di tanggal 7 Januari 2020, Pemerintah China menyatakan bahwa kasus ini disebabkan karena adanya jenis virus corona baru yang selanjutnya dinamai SARS-CoV-2 atau "*Sindrom Pernafasan Akut Parah Coronavirus 2*". Asal virus ini adalah dari keluarga yang sama dengan virus yang menyebabkan SARS serta MERS walaupun asalnya dari keluarga yang sama, tapi SARS-CoV-2 lebih menular dibanding SARS-CoV serta MERS-CoV (CDC China, 18 2020). Angka kematian kasarnya berbeda di tiap negara tergantung pada populasinya, wabah yang berkembang pada suatu negara, serta adanya pemeriksaan laboratorium masa inkubasi COVID -19 yang sekitar 5-6 hari, dengan rentang antara 1 dan 14 hari tapi bisa sampai 14 hari. Resiko tertularnya paling tinggi didapatkan di hari-hari pertama, dikarenakan adanya konsentrasi virus di sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi langsung bisa menularkan sampai pada 48 jam sebelum gejala awal timbul (presimptomatik hingga 14 hari sesudah adanya gejala). Studi Du Z et .al , (2020) menyatakan bahwa 12,6 % penyaluran presiptomatik. Penting untuk tau mengenai periode presimptomatik dikarenakan adanya kemungkinan penyebaran virus lewat droplet ataupun sentuhan dengan benda yang terkontaminasi. Sebagai tambahan, ada kasis konfirmasi yang tidak memiliki gejala (asimptomatik), walaupun risiko menularnya sangatlah rendah tapi tetap memungkinkan untuk adanya penularan. Didasarkan dari epidemiologi dan virologi sekarang ini menyatakan bahwa COVID -19 mulanya dibawa oleh orang yang memiliki gejala (simptomatik) dan ditularkan pada orang yang jaraknya dekat lewat tetesan. Tetesan ini adalah partikel yang isinya udara yang berdiametr dibawah 5-10 m. Penularan droplet ada saat orang yang ada di jarak yang dekat (1 meter dengan orang yang mempunyai gejala pernapasan (contohnya, batuk ataupun bersih) maka droplet memiliki resiko mengenai mukosa (mulut dan hidung) ataupun konjungtiva (mata). Penularan juga bisa lewat benda ataupun permukaan yang terkontaminasi

droplet pada sekitar orang yang memiliki gejala. Sehingga, penularan virus COVID-19 bisa lewat kontak langsung dengan orang yang terinfeksi serta kontak tidak langsung pada permukaan benda yang digunakan oleh orang yang terinfeksi (contohnya, stetoskop ataupun termometer) (Napsawati, 2020).

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional pada penelitian ini dibuat guna merumuskan garis besar penelitian supaya penggalan data dapat mencapai fokus atau tidak keluar dari tujuan utama penelitian sesuai dengan karakteristik yang diamati di lapangan. Definisi Operasional bertujuan untuk menggali penelitian berdasarkan garis besar yang diperoleh dari judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Akibat Masa Pandemi COVID-19”** (*Studi Penelitian Di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo*).

Variabel pada judul penelitian ini pada akhirnya dapat menciptakan beberapa garis besar, kemudian membentuk suatu indikator yang dapat diukur dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Verifikasi Data Administratif Kepada Calon Penerima Bantuan Sosial
2. Pemahaman Mengenai Acuan Kebijakan, Proses, Pemetaan Keadaan Di Lapangan, Hingga Teknis Penyaluran Bansos Sesuai Dengan Instruksi Kementerian Sosial
3. *Monitoring* Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Musyawarah Calon Penerima Bantuan Sosial
4. Menjembatani Inisiatif Masyarakat Dalam Mendapatkan Bansos Secara Informatif dan Sesuai Prosedur Berlaku

Ketiga indikator Definisi Operasional di atas adalah dasar untuk peneliti ketika menggali data data dan observasi sebagaimana keadaan sebenarnya di internal Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo. Sehingga itu sangat penting untuk mengacu pada Definisi Operasional di atas sebagai bentuk dari penerapan metodologi penelitian secara tepat.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini ialah deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif, yakni memperkirakan situasi objek serta subjek, baik seseorang, masyarakat, lembaga, dan lainnya, dan berdasarkan pada hasil observasi serta wawancara yang mendalam pada penelitian ini dan juga memberikan pendapat mengenai temuan yang ada pada lapangan serta dikaitkan dengan konsep operasional, kerangka pemikiran dan Undang-Undang yang mempunyai ikatan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan pernyataan (Koentjaraningrat, 1993), bahwa penelitian kualitatif merupakan desain penelitian yang mempunyai tiga format. Ketiga format ini terdiri dari penelitian deskriptif, verifikasi serta format Grounded research. Penelitian kualitatif merupakan model yang tepat dipakai pada penelitian yang tidak memiliki pola.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi bertempat di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo. Alasan dipilihnya tempat ini untuk penelitian karena Dinas Sosial P3A merupakan tempat yang memiliki data terkait bantuan sosial yang diberikan oleh masyarakat miskin Kabupaten Ponorogo, selain itu juga menjadi mediasi dalam penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat miskin di Kabupaten Ponorogo. Sehingga, penulis tertarik meneliti tentang cara **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Akibat Masa Pandemi COVID-19”**

3. Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini memakai metode *Purposive Sampling* yang merupakan metode untuk mengambil sampel penelitian dengan memilih kriteria khusus pada narasumber yang akan diwawancarai yang sama dengan tujuan dari penelitian, yang diharap bisa memberikan jawaban mengenai masalah yang sedang diteliti. Berdasarkan pernyataan (Sugiyono, 2010), *Purposive Sampling* merupakan teknik dalam memilih sampel penelitian menggunakan berbagai pertimbangan tertentu. Informan kunci dipakai dalam memudahkan saat melakukan penelitian guna mengeksplorasi obyek yang akan diteliti, dengan tujuan agar data yang didapatkan lebih representatif. Dalam memilih informan, memakai teknik *purposive sampling*, yang pada penelitian ini informasinya ialah Lembaga Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah terpenting pada penelitian, yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat pada proses penelitian. Teknik untuk mengumpulkan data pada penelitian ini ialah menggunakan metode wawancara, observasi, serta dokumentasi.

Goetz & LeCompte (1984) menyatakan ada beberapa cara untuk mengumpulkan data pada penelitian kualitatif, yang pada umumnya digolongkan pada dua jenis, yakni yang sifatnya interaktif serta non-interaktif. Data interaktif artinya terdapat kemungkinan adanya saling mempengaruhi diantara peneliti dan sumber datanya. Teknik non-interaktif artinya tidak terdapat pengaruh diantara peneliti dan sumber datanya, dikarenakan sumber datanya adalah benda, manusia atau yang lainnya.

Teknik penelitian kualitatif sebenarnya adalah proses menyelidiki, yang berarti kita bisa membuat fenomena sosial dengan cara bertahap, selanjutnya melaksanakan penelitian, yang biasanya dengan cara mempertentangkan, mereflesikan, melakukan perbandingan, penyusunan katalog, serta melakukan klasifikasi terhadap objek yang diteliti. Segala aktivitas tersebut adalah untuk menarik sampel guna mencari keseragaman serta sifat umum serta aktivitas yang dikerjakan secara berulang oleh peneliti di lapangan.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang paling ampuh pada penelitian, dikarenakan tujuan terpenting pada penelitian ialah mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data bisa dilakukan dengan bermacam-macam sumber serta setting. Pada penelitian kualitatif, dalam mengumpulkan data bisa dilakukan di kondisi yang alamiah, sumber data primer serta dalam mengumpulkan data bisa dilakukan lebih banyak saat observasi, wawancara yang mendalam, serta dokumentasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik wawancara mendalam, observasi serta dokumentasi. Ini sejalan dengan filosofi penelitian alamiah, ketika mengambil data penelitian dilakukan dengan melakukan interaksi serta berbaur dengan intensif dengan responden. Dokumentasi serta pengumpulan data pendukung pada penelitian ini dipakai guna menambah data penelitian serta guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

a. Wawancara

Penelitian memakai wawancara semi terstruktur, yakni dengan mempersiapkan sejumlah pertanyaan untuk dijadikan pegangan dalam melakukan wawancara, tapi bisa dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kondisi serta informasi yang diperlukan. Wawancara semi struktural bertujuan untuk mencari pokok masalah dengan terbuka, yang mana pihak yang diwawancarai akan dimintai ide serta pendapat mereka. Wawancara dengan mendalam ini memiliki tujuan untuk lebih mendalami suatu pandangan mengenai objek yang diteliti. Peneliti akan melakukan wawancara untuk mendapatkan serta melakukan indentifikasi mengenai masalah yang akan ditemukan bahan kajiannya. Nantinya akan terjadi interaksi diantara peneliti dan informan. Informan juga memiliki hak untuk mengetahui isi dari yang sedang diteliti, tujuan, serta kegunaan dari penelitian ini. Sesudah informan percaya kepada peneliti, akan semakin lengkap juga data yang didapatkan. Dalam penelitian kualitatif, proses wawancaranya biasanya merupakan wawancara tak terstruktur, ini dikarenakan peneliti tak tahu dengan detail tentang apa yang akan peneliti tuju. Sehingga tujuan dari wawancara yang peneliti lakukan guna mendapatkan data dengan selengkap-lengkapnyanya akan masuk ke dalam informasi, serta dilakukan dengan informan. Sehingga wawancara yang dilakukan akan memiliki sifat terbuka serta akan mengarah dalam informasi, dan juga dikerjakan secara tidak formal terstruktur, untuk mendapatkan data dari informan mengenai apa semua hal yang bermanfaat untuk dijadikan dasar dalam menggali informasi dengan lebih lengkap, jauh serta mendalam.

Dalam wawancara terdapat sejumlah tahapan. Tahap pertama yakni peneliti memilih informan yang akan diwawancarai, ini harus diterapkan dikarenakan peneliti wajib tahu informan yang dapat memberikan data dengan pasti dan akurat mengenai objek penelitian. Tahap kedua, peneliti harus bisa menyesuaikan diri, paham, serta tau dengan kepribadian serta karakter dari orang yang akan diwawancarai. Karena informan nantinya akan merasa nyaman dan dapat memberikan semua informasi yang kita butuhkan. Tahap ketiga, ketika sedang bertemu dengan orang yang akan diwawancarai, peneliti harus tahu serta dapat menilai kondisi, situasi, serta konteks, ini haruslah peneliti pahami wajar dalam melakukan wawancara dapat menyesuaikan situasi serta kondisi dari orang yang akan diwawancarai. Tahapan keempat, peneliti haruslah mendapatkan informasi dengan lengkap serta data yang didapatkan bisa sama

dengan apa yang sedang diteliti, namun pada saat melakukan wawancara peneliti haruslah bisa menjaga situasi wawancara yang tidak terlihat formal. Wawancara haruslah dengan santai, lancar, serta nyaman ketika melakukannya. Dalam melakukan wawancara, peneliti jangan sampai memotong pembicaraan, serta harus menjadi lawan bicara serta pendengar yang baik dan sopan, namun tetap harus menjadi pendengar yang kritis. Tahapan yang terakhir ketika melakukan wawancara dari semua yang didapatkan, peneliti harus membuat kesimpulan sementara serta buatlah konfirmasi kesimpulan tersebut dengan orang yang diwawancarai. Ini bertujuan agar data informasi yang informan berikan dapat sesuai dengan persepsi yang ada.

b. Observasi

Teknik observasi yang dilakukan pada penelitian kualitatif ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung mengenai fenomena yang terjadi pada lokasi penelitian, yang selanjutnya akan dilakukan pencatatan prikalu serta apa yang terjadi seperti keadaan yang sebenarnya. Pada penelitian ini, teknik observasi yang dipakai ialah non-partisipatif yakni peneliti tidak langsung terlibat pada kegiatan orang yang sedang peneliti amati, peneliti cuma sebagai pengamat independent. Observasi pada penelitian ini dilakukan langsung di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo.

Menurut Marshall (1995) *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Observasi adalah salah satu cara yang terdiri dari pelbagai proses psikologis maupun biologis. Dan terdapat dua langkah yang paling penting, yakni ingatan dan pengamatan.

Teknik observasi dipakai dalam menemukan informasi dari semua sumber informasi yang bisa berupa perilaku, peristiwa, lokasi, tempat, rekamanm dan benda. Observasi bisa dikerjakan dengan caralangsung ataupun tidak langsung.

Saat memakai metode observasi, cara yang terefektif ialah melengkapi dengan blangko maupun format pengamatan untuk instrumennya. Format ini isinya ialah item mengenai situasi yang diperkitakan terjadi.

Observasi (observation) atau pengamatan adalah teknik maupun cara dalam melakukan pengumpulan data yang caranya ialah mengamati semua aktifitas yang ada. Aktifitas ini bersamaan dengan siswa belajar, guru mengajar, kepala sekolah yang masi mengarahkan, personil bidang kepegawaian yang sedang

rapat. Observasi non-partisipan (*non-participatory observation*), peneliti tidak ikut serta dalam aktivitas, peneliti cuma melakukan pengamatan terhadap kejadian, tidak ikut dalam kegiatan (Sukmadinata, 2009:220).

c. Dokumentasi

Dokumen dipakai guna melengkapi metode observasi serta wawancara pada penelitian kualitatif. Dokumentasi ini bentuknya bisa berupa gambaran, tulisan, maupun karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang bentuknya tulisan bisa berupa sejarahm catatan harian, peraturan, kehidupan, serta kebijakan. Pada penelitian ini, dokumentasi yang dipakai ialah berupa laporan serta data yang berhubungan dengan aktifitas tentang cara mengatasi kemiskinan pada Kabupaten Ponorogo. Dokumen tertulis serta arsip adalah sumber data yang terpenting untuk penelitian kualitatif, khususnya untuk sasaran kajian yang latar belakangnya mengarah pada masa yang lalu yang sangatlah berhubungan dengan situasi di masa sekarang pada saat penelitian.

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumentasi ini bentuknya bisa berupa gambaran, tulisan, maupun karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang bentuknya tulisan bisa berupa sejarahm catatan harian, peraturan, kehidupan, kebijakan, sketsa serta lainnya. Dokumen dengan bentuk karya contohnya adalah karya seni yang berbentuk patung, gambar, film, dan lainnya. Studi dokumentasi bisa digunakan untuk melengkapi data dari metode wawancara serta observasi pada penelitian kualitatif.

Dokumen adalah bahan kajian yang berbentuk tulisan, foto, film maupun hal lainnya yang bisa digunakan dalam melengkapi data selain lewat wawancara ataupun dokumentasi pada penelitian kualitatif. Berdasarkan pernyataan Guba and Lincoln (1981:235) menjelaskan bahwa “Dokumen digunakan untuk bahan penelitian sebagai sumber data karena dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya, dan mendorong”. Untuk dijadikan bukti dalam sebuah pengujian. Dokumen memiliki sifat yang alamiah, yang sama seperti konteks, lahir serta ada pada konteksnya. Dokumen tidak sulit didapatkan, namun dokumen bisa ditemukan sendiri. Hasil kajiannya bisa dipakai dalam memperluas pada kajian yang masih diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan kualitatif ialah sebuah pendekatan yang mana mengungkap suatu situasi sosial serta

umunnya menggunakan deskripsi pada sebuah keadaan objek baik seseorang, masyarakat, lembaga, ataupun lainnya yang berdasarkan pada observasi dan wawancara. Metode yang dipakai ialah kajian literatur yang relevan pada masalah yang sedang diteliti. Metode ini dilakukan dengan mengkaji sekumpulan data pustaka, dibaca, dicatat dan diolah menjadi bahan penelitian. Berdasarkan pernyataan (Danial & Warsiah, 2009), “Studi literatur merupakan sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti memakai, mengumpulkan serta mencari sejumlah beberapa buku yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan tersebut”. Penelitian ini juga menggunakan metode purposive sampling. *Purposive sampling* adalah teknik untuk mengambil sampel yang peneliti lakukan untuk menggunakan, melihat serta mengambil keputusan tentang sejumlah kriteria spesifik pada informan yang sama seperti tujuan penelitian yang di akhir nanti diharap dapat menjawab masalah yang sedang diteliti. Menurut (Sugiyono, 2010), purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan memakai sejumlah pertimbangan tertentu.

Dalam penelitian ini, data yang didapatkan akan digolongkan dalam dua bagian, yakni data pendukung dan data utama. Data pendukung ialah data yang berbentuk dokumen, catatan, gambaran, foto dan bahan lainnya yang bisa dijadikan pendukung pada penelitian ini. Sedangkan data utama ialah data yang didapatkan dari narasumber, yakni orang yang langsung terpubat pada aktifitas untuk dijadikan fokus dalam penelitian

Sumber data utama pada penelitian kualitatif bisa berbentuk ucapan dari informan yang sedang diamati pada penelitian ini. Milles dan Huberman pada buku basrowi menyatakan bahwa pada prinsipnya analisis data kualitatif diterapkan bersamaan ketika mengumpulkan data yang dipakai meliputi tiga kegiatan seperti dibawah; (Suwandi, 2008)

a. Reduksi Data

Pemilihan dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan serta mentransformasi data kasar yang ada pada lapangan. Reduksi data adalah cara untuk menganalisis guna mengelompokkan, menajamkan, mengarahkan, mengorganisir, serta membuang data yang tidak dibutuhkan serta dapat ditarik kesimpulannya.

b. Penyajian Data

Semua informasi yang sudah disusun akan terdapat kemungkinan dan juga terdapat penarikan kesimpulan ataupun menentukan tindakan selanjutnya. Dengan melihat semua data yang sudah disajikan, bisa mengetahui yang sedang terjadi serta apa yang seharusnya dilakukan, mengambil tindakan maupun melakukan analisis berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkan.

c. Menarik kesimpulan

Pada tahapan ini, peneliti akan mencari makna dari data yang sudah didapatkan menggunakan pola, tema, hubungan, persamaan, ataupun lainnya yang terkadang muncul pada satu kesatuan informasi yang dapat dipahami dengan mudah, melakukan penafsiran serta mengategorikan sesuai pada permasalahannya. Dari data maupun informasi yang sudah didapatkan akan dicoba untuk menyimpulkan guna menjawab tentang masalah yang sedang diteliti.

6. Keabsahan Data

Pemeriksaan pada keabsahan data pada intinya, tidak hanya dipakai dalam menyanggah balik yang dituduhkan pada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, namun dijadikan unsur yang tak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Keabsahan data diterapkan guna untuk membuktikan apakah penelitian yang dikerjakan ini adalah sungguh-sungguh penelitian ilmiah dan juga untuk melakukan pengujian kepada data yang sudah didapat. “Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji, credibility, transferability, dependability, & confirmability*”.

Agar data dalam penelitian kualitatif bisa dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah haruslah melakukan uji keabsahan data. Berikut adalah uji keabsahan data yang bisa dilakukan:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan bisa untuk menambah kredibilitas data. Perpanjangan pengamatan memiliki arti peneliti melakukan penelitian kembali di lapangan, mengamati, serta mewawancarai kembali informan yang sudah diteliti agar didapatkan informasi terbaru, ini juga memiliki manfaat yakni dapat semakin akrab terbukam dan akan terjalin kepercayaan dengan informan

sehingga bisa mendapatkan informasi lebih lengkap lagi. Perpanjangan pengamatan juga dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap tingkat kredibilitas data yang akan difokuskan pada pengujian pada data yang sudah didapatkan. Data yang didapatkan sudah dilihat kembali di lapangan, apakah sudah benar atau tidak dan adakah perubahan dari penelitian sebelumnya. Sesudah dilakukan pengecekan ulang, data yang sudah didapatkan akan bisa dipertanggungjawabkan yang artinya data sudah kredibel, sehingga perpanjangan pengamatan bisa berakhir.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Menambah kecermatan ataupun ketekunan dengan cara berkelanjutan sehingga dapat memastikan kepastian data serta urutan kronologis peristiwa bisa dilakukan pencatatan ataupun perekaman secara sistematis. Meningkatkan kecermatan adalah suatu cara dalam melakukan pengontrolan dan pengecekan terhadap pekerjaan untuk memastikan apakah data sudah dibuat, dikumpulkan serta disajikan sudahlah benar ataupun belum. Guna meningkatkan kecermatan peneliti bisa menggunakan berbagai cara seperti membaca semua referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, ataupun semua dokumen yang berhubungan dengan hasil dari penelitian yang sudah didapatkan. Menggunakan cara itulah, peneliti dapat membuat laporan dengan cermat yang nantinya laporan akan menjadi lebih berkualitas.

c. Triangulasi

Wiliam Wiersma (1986) menjelaskan triangulasi pada pengujian kredibilitas artinya ialah mengecek data dari semua sumber menggunakan berbagai cara. Sehingga akan terbentuk triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, serta waktu.

1) Triangulasi Sumber

Guna melakukan pengujian terhadap kredibilitas data dilakukan menggunakan pengecekan data yang sudah didapat lewat berbagai sumber. Data yang didapat akan dilakukan analisis oleh peneliti yang nantinya akan menjadi sebuah kesimpulan dan akan dimintai kesepakatan (*membercheck*) memakai tiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik

Guna melakukan pengujian terhadap kredibilitas data menggunakan pengecekan data pada sumber yang sama menggunakan teknik lainnya.

Contohnya dalam pengejeakan data bisa lewat wawancara, observasi, dokumentasi. Jika teknik pengujian kredibilitas data ini data yang dihasilkan berbeda, peneliti akan berdiskusi lagi pada informan yang bersangkutan guna memastikan data mana yang dinilai benar.

3) Triangulasi Waktu

Data yang didapatkan menggunakan teknik wawancara di pagi hari ketika informan masih segar, akan membuat data lebih valid maka lebih kredibel. Dilanjutkan dengan melakukan pengecekan dan wawancara, observasi di lain waktu. Jika hasil uji data yang didapatkan berbeda, peneliti harus mengulangi hingga didapatkan data yang pasti.

